Redaksi:

Edi Cahyono, Maxim
Napitupulu, Maulana
Mahendra, Muhammad H.T.,
Hemasari Dharmabumi

Diterbitkan oleh:

Yayasan Penebar

pEnEbar e-news terbit sebagai media pertukaran dan perdebatan soal-soal perburuhan dan globalisasi. Kami mendukung gerak anti-globalisasi masyarakat Indonesia. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan jebakan negeri-negeri imperialis untuk menjadikan negeri-negeri miskin terus menjadi koloni dan dihisap oleh negeri-negeri maju. Kami menerima tulisan-tulisan yang sejalan dengan misi kami untuk dimasukkan dan diedarkan melalui e-news ini.

Menentang Globalisasi Imperialisme: Pengantar Ekonomi-Politik Perburuhan Edi Cahyono

Fenomena globalisasi telah ada sejak dulu. Apa yang menyebabkan globalisasi menjadi fenomena kontemporer adalah karena telah terjadi perubahan-perubahan besar yang membuat globalisasi perlu disimak secara seksama sebab kali ini berbeda.

Fenomena gobalisasi saat sekarang ini bukan lagi semacam perjalanan kaum perambah dunia ala VOC (Belanda) dan EIC (Inggris) atau para pedagang Spanyol, Portugis, Tionghoa dan Islam di abad ke-15 sampai 18. Ini bukan pula kolonialisme Hindia-Belanda yang bercokol di wilayah Nusantara sejak awal abad ke-19 hingga menjelang paruh pertama abad ke-20. Ini juga bukan berbagai kendala perdagangan internasional yang memerlukan preferensi khusus seperti *General System of Preferences* (GSP) yang merupakan persoalan di tahun 1980an hingga pertengahan 1990an. Globalisasi lebih merupakan kekuatan yang meminta pengurangan (hingga penghapusan) intervensi negara—secara besar-besaran—dalam perdagangan dan investasi. Tidak ada lagi kebutuhan membatasi perdagangan melalui sistem kuota. Buka pintu pasar seluas-luasnya untuk barang-dagangan *over*-produksi dunia; hapus *tariffs*—yang dikenakan terhadap barang-dagangan impor—agar penduduk lokal lebih

mempunyai daya beli.

Krisis di paruh akhir 1980an yang terjadi di negeri-negeri komunis (sosialis), yang mengakibatkan—khususnya—keruntuhan Uni Soviet dan negeri-negeri Eropa Timur telah mempercepat realisasi gagasan globalisasi imperialisme.¹

Kekuatan modal—untuk dapat berkuasa atas seluruh penjuru dunia—menggunakan organisasi bernama *World Trade Organisation* (WTO).² WTO sebagai lembaga terdepan melakukan harmonisasi terhadap kekuatan-kekuatan finansial yang telah ada sebelumnya dengan meminta IMF dan World Bank melakukan reformasi diri. Tidak ketinggalan organisasi perburuhan ILO—yang mengatur hak-hak buruh—pun, harus diselaraskan dalam kerangka globalisasi ini.

Bagi para pendukungnya, globalisasi dipercaya telah memberikan perubahan struktur ekonomi dan politik dunia. Ketidak-efisienan kehidupan ekonomi yang diakibatkan oleh kontrol negara mulai terkikis oleh globalisasi. Restrukturisasi ekonomi internasional telah terjadi, di mana perusahaan-perusahaan multinasional dengan mudah dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Institusi negara dianggap terlalu lamban dan tua untuk mengantisipasi laju pertumbuhan dan pergerakan modal multinasional.

Gagasan globalisasi imperialisme sejalan dengan prinsip ideologi neo-liberal yang diawali oleh gagasan konservatif *Thatcherism* dan *Reaganomics*. Gagasan neo-liberal percaya bahwa seharusnya negara tak berperan dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi internasional dan nasional. Buah dari gagasan ini melahirkan ide-ide penurunan pajak investasi, deregulasi perdagangan, penghapusan proteksi ekonomi yang diakibatkan oleh penerapan bea cukai, dan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Namun apakah benar globalisasi imperialisme akan membawa kemakmuran bagi masyarakat dunia? Penolakan terhadap berbagai

¹ Khususnya di Eropa, keruntuhan negeri-negeri sosialis Eropa Timur disambut dengan dibentuknya jalinan kerjasama Uni Eropa (*European Union*).

² Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan GATT yang berakhir pada Desember 1994. WTO kemudian resmi dilaksanakan sejak awal Januari 1995.

peraturan yang ada di dalam WTO menjadi indikasi adanya reaksi yang muncul dari masyarakat dunia. Demonstrasi besar yang terjadi di Seattle, Amerika Serikat pada November 1999 adalah bukti kuatnya penolakan terhadap globalisasi imperialisme.

Mengapa globalisasi harus ditentang?

Chris Harman dalam artikel “Anti-capitalism: Theory and Practice,”³ mengupas globalisasi dan sejumlah kritik mendasar. Gerakan menentang globalisasi imperialisme memang mendapat julukan “Anti-Kapitalis.” Namun hal ini tidak membuat penentangan terhadap globalisasi imperialisme menjadi identik dengan sosialisme. Gerakan “anti-kapitalis” ini merebak dikarenakan kapasitas-kapasitas berbisnis dan berinvestasi kelas burjuasi dari negeri-negeri miskin dan berkembang menjadi terbatas—kalau bukan terhentikan—akibat penguasaan luas monopoli di tangan segelintir korporasi raksasa dunia. Mayoritas ruang-ruang berbisnis dikuasai segelintir korporasi-korporasi raksasa dunia.

Berangkat dari hal itu Chris Harman mencoba mengklasifikasikan lima persoalan yang perlu diperdebatkan yaitu:

- Pertama: Apakah WTO dapat direformasi, atau mesti dihapuskan?
- Kedua: Klausa sosial, buruh anak, hak berserikat
- Ketiga: Utang
- Keempat: Kemiskinan, pembangunan dan perusakan lingkungan
- Kelima: Globalisasi dan kapitalisme

Harman menekankan posisi anti dan menentang globalisasi imperialisme, sehingga, WTO harus dibubarkan ketimbang direformasi.

Sementara itu IUF, suatu organisasi yang peduli dengan persoalan pangan, berangkat dengan pertanyaan menggugah:

Suatu pandangan umum pendekatan untuk memahami sistem pangan dunia mengangkat beberapa persoalan dasar. Bila akses pada keamanan, pangan sehat adalah suatu hak manusia yang mendasar, mengapa 820 juta orang saat ini hidup dalam kelaparan? Mengapa orang-orang di negeri-negeri pengekspor pangan hidup dalam lapar, dan mengapa para pekerja pertanian antaranya kurang gizi? Bila nilai ekspor global per tahun dalam

³ Dimuat dalam *International Socialism* No 88, London, 2000.

produk-produk pertanian adalah USD 545 milyar, mengapa upah para pekerja pertanian dan kaum tani kecil tercantum di antara tingkat-tingkat tertinggi dari kemiskinan global?⁴

Dengan mengangkat kenyataan ketidak-seimbangan (*inequality*) dengan kurbananya adalah sang produsen (para pekerja pertanian) di negeri-negeri miskin/berkembang, IUF menggugah kita tentang persoalan pangan dalam kebijakan WTO.

Dalam pelacakannya, IUF menyoroti naskah Bab 11 NAFTA yang menjadi dasar untuk bekerjanya berbagai penjelasan yang digunakan dalam perjanjian perdagangan bilateral negara-negara AS dan Kanada. Suatu posisi yang benar-benar meminggirkan peranan negara dalam berbisnis. Bahkan suatu korporasi dapat menuntut negara untuk mendapatkan ganti-rugi akibat pemerintahan negeri tertentu menerapkan peraturan tertentu—walaupun peraturan tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas, (misalnya pelarangan penggunaan pestisida berbahaya untuk pertanian)—namun mengurangi keuntungan finansial korporasi. Hal ini telah dibuktikan pada beberapa penuntutan oleh korporasi-korporasi sebagaimana terjadi di negeri-negeri Kanada, Argentina, Bolivia, Cina, dan Amerika Serikat.

Sementara upaya untuk menyelipkan gagasan-gagasan *Boks Pembangunan* oleh negeri-negeri miskin⁵ dalam perjanjian-perjanjian WTO telah berakhir kandas. Karena gagasan seperti itu masih memberi ruang bagi berperannya negara secara luas. Hal itu tidak sejalan dengan keinginan korporasi-korporasi raksasa yang telah memonopoli produksi dan distribusi perdagangan dunia:

Pemerintah AS berargumen bahwa Boks Pembangunan adalah bertentangan dengan arah yang dikemukakan pada Deklarasi Tingkat Menteri Doha dan bahwa setiap macam penanganan khusus dan berbeda harus disubordinasikan pada logika pasar secara keseluruhan dari Perjanjian tentang Pertanian, mempromosikan investasi dan perdagangan berorientasi-pasar

⁴ IUF/UITA/IUL. *The WTO and the World Food System: a trade union approach*. Geneva 2002

⁵ Diajukan oleh negeri-negeri Kuba, Republik Dominika, El Salvador, Haiti, Honduras, Kenya, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Sri Lanka, Uganda, dan Zimbabwe.

dalam produksi pertanian.

IUF mengajukan strategi penggalangan serikat-serikat untuk menolak pengendalian kehidupan oleh turunan-turunan baru dari bab-bab NAFTA yang akan dilangsungkan oleh rejim WTO. Dalam bahasa Kiri-nya Chris Harman pun memilih semboyan tempur kaum Marxis: “Kaum proletar sedunia bersatulah!” sebagai inti dari perjuangan melawan kapitalisme.

Indonesia dan Globalisasi Imperialisme

Berbagai pihak melihat bahwa Indonesia telah mengglobal tanpa mengalami hambatan. Mengglobal di sini bukan dalam arti bahwa barang-dagangan dan kekuatan finans Indonesia menguasai negeri-negeri lain; namun sebaliknya, kekuatan finans internasional/imperialis telah mendekap berbagai aktivitas dan kesempatan bisnis di dalam negeri Indonesia.

Krisis ekonomi yang menyergap Indonesia sejak 1997 telah memastikan kebangkrutan negeri ini, meskipun dari sisi pemerintah tidak pernah ada pernyataan resmi tentang kebangkrutan. Namun dari keputusan—di masa Presiden Soeharto (awal 1998)—untuk bersedia masuk ke dalam program penyelamatan IMF melalui *Structural Adjustment Program* (SAP—Program Penyesuaian Struktural) implisit negeri ini telah bangkrut. Keropos lain tentunya dapat ditengok melalui jumlah utang yang ‘tak terhingga,’ korupsi BLBI (Bukti Likuiditas Bank Indonesia) yang ‘tak terhingga,’ dan borok-borok korupsi yang tetap hidup dan tidak pernah diupayakan untuk dituntaskan secara hukum. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negeri dengan tingkat korupsi tertinggi, pengabaian *rule of law* (supremasi hukum), selain utang terbesar.

Bila dalam perjalanan lima tahun terakhir begitu banyak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dijual ke kapital finans asing, ini menunjukkan memang ada kebutuhan akan dana segar, sementara solusinya diambil dengan cara menjual aset negara. Bagaimana pun, ini bukan sekedar persoalan “negara tidak mempunyai rasa nasionalisme lagi!”

Sementara di sisi rakyat luas dapat dilihat begitu banyak PHK di

dalam industri manufaktur telah membuat angka pengangguran melambung tinggi. Kemungkinan jumlah pengangguran telah melampaui 40 juta orang. Petani tidak mampu bersaing dalam memproduksi produk-produk pertanian. Saat sekarang, dapat dikatakan, beras dan gula yang dikonsumsi di Indonesia adalah produk impor ketimbang produk petani lokal. Hal serupa tentunya dapat pula dilihat pada buah-buahan dan sayur-mayur impor. Inikah yang disebut tata-niaga! Tidakkah ini ganjil? Bukankah Indonesia dikenal sebagai negeri agraris sejak jaman dahulu kala! Bahkan industri gula dari Jawa (jaman Hindia-Belanda) telah menjadi basis industrialisasi negeri Belanda pada abad-19!

Karena bangkrut negara Indonesia menjadi begitu patuh terhadap para penguasa-perdagangan-dunia. Bila kita ambil contoh mutakhir adalah krisis Aceh. Krisis ini sebenarnya lebih merupakan perang dengan isu menutup kemungkinan terlepasnya Aceh dari Indonesia.⁶ Sebetulnya ini adalah persoalan yang bermuasal cukup panjang ketimbang keinginan mendesak-tanpa latar-belakang-untuk berpisah dari Indonesia.⁷ Namun, hal yang begitu mendesak untuk dibicarakan sebenarnya adalah kebutuhan Indonesia untuk mendapatkan utang segar pasca IMF. Pemerintah AS berjanji menggantikan peran IMF di Indonesia.⁸ Bagaimanapun, Indonesia sudah demikian tergantung terhadap utang internasional. Pilihannya adalah melakukan penindasan secara militer terhadap rakyat Aceh. Tindakan seperti ini diharapkan akan membangun *image* positif terhadap dunia internasional (bisnis internasional)

⁶ Agak berlebihan sekali bila dibandingkan dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan-ke tangan Malaysia-yang tidak didahului dengan mengangkat persoalan ke dalam 'kerangka krisis' pula.

⁷ Kebutuhan rakyat Aceh untuk keadilan tidak pernah mendapatkan kejelasan. Apa yang terjadi terhadap gugatan rakyat Aceh untuk berbagai pelanggaran HAM selama berlangsungnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh? Adakah jenderal yang diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atas DOM Aceh? Jawabnya: tidak ada. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas puluhan ribu rakyat Aceh yang terbunuh selama DOM?

⁸ Artinya akan terjadi pergeseran utang dari bersifat multilateral (melalui IMF) menjadi bilateral (perjanjian antar dua negara-dengan AS). Bila demikian, AS akan menggunakan Bab 11 NAFTA (IUF/UITA/IUL. *The WTO and the World Food System: a trade union approach*. Geneva 2002).

bahwa negara Indonesia tetap berperan dalam menghalau berbagai keresahan sosial-politik yang—mungkin—mengganggu investasi dan pengedukan kekayaan tanah-air. Hal itu tentu bukan sesuatu yang baru. Hal yang sama telah berlangsung selama berkuasanya Orde Baru Suharto: ‘bisnis berlindung dibalik laras senjata.’ Dalam banyak hal negara Indonesia bukan saja menunjukkan suatu kepatuhan namun telah *bertindak mendahului sebelum ada permintaan*.⁹ Hal ini yang oleh para analis ‘*the state in post-colonial society*’ (‘negara dalam masyarakat pasca-kolonial’) disebut sebagai otonomi relatif dari negara.¹⁰

Dengan demikian, sebetulnya, negara Indonesia telah mengajukan

⁹ Ketika operasi militer di Aceh sedang berlangsung—dalam beberapa hari setelah gagalnya perundingan dengan pihak GAM di Jepang (pertengahan Mei 2003)—pihak Amerika Serikat menyatakan “sebaiknya dalam menyelesaikan konflik Aceh pemerintah Indonesia menempuh jalur perundingan.” Sementara perundingan di Jepang sendiri menjadi perundingan yang tidak *fair*, karena pada saat berlangsung perundingan pihak RI telah mengirimkan 26 ribu pasukan militer ke Aceh. Perundingan dilaksanakan dengan laras senjata mengarah ke Aceh.

¹⁰ Analisis- analisis ini muncul tahun 1980an untuk memahami keterbelakangan (*underdevelopment*) yang berlangsung di negeri-negeri Dunia Ketiga dan bekas jajahan (*post-colonial*). Dalam konsepsi pendekatan ‘negara pasca-kolonial’ fenomena negara-negara Dunia Ketiga dipahami akan selalu *dependent* terhadap negeri-negeri *center* (negeri pusat/maju—penjajah). Relasi ini disebut sebagai relasi *center-peripheral* (pusat-pinggiran). Negeri *peripheral* adalah negeri miskin bekas jajahan. Pendekatan ini disebut *post-colonial* karena kolonialisme yang telah membangun konstruksi ekonomi-politik *dependent* ini. Dinamika politik dan ekonomi negeri-negeri *peripheral* begitu terkait dengan negeri *center*. Meskipun demikian negeri *peripheral* mempunyai otonomi relatif (*relative autonomy*), yakni otonomi untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tidak secara langsung, secara eksplisit, disampaikan/diminta oleh negeri-negeri *center* yang adi-kuasa (*super-power*). Namun sebenarnya tindakan apa pun yang dilakukan pemerintahan di negeri-negeri tersebut menguntungkan bagi kelangsungan kapitalisme maupun perdagangan dan investasi internasional negeri-negeri *center* yang adi-kuasa. (Hamza Alavi, “State and Class Under Peripheral Capitalism,” dalam Hamzah Alavi & Teodor Shanin (eds.) *Introduction to The Sociology of Developing Societies*, Macmillan Press Ltd.; Farchan Bulkin, “Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian,” *Prisma*, no. 2,

kapitulasinya terhadap kepentingan korporasi raksasa global. Ini menjadi bentuk 'kolonialisme' tersendiri. 'Negara' Indonesia menaklukkan diri sendiri terhadap kepentingan globalisasi. Apa yang dikonstruksikan sebagai kewenangan pemerintah nasional dan lokal, telah dengan sendirinya memposisikan diri sebagai administratur kepentingan global. Sebuah fenomena yang mirip Negara [Kolonial] Hindia-Belanda, yang—sebenarnya—cukup hanya dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral.

Krisis Kapitalisme Global dan Kebangkrutan Indonesia

Sedikit mundur ke belakang. Krisis finansial di Indonesia dapat dilacak sejak menjelang kejatuhan Soeharto mulai dengan 1). likuidasi 16 bank pada Oktober 1997. Ini menyebabkan ribuan nasabah bank dengan simpanan di atas 20 juta potensial kehilangan uangnya.¹¹ 2). Dilanjutkan dengan penyitaan emas dan uang rupiah di bandar-udara (bandara) Sukarno-Hatta dan pelabuhan-pelabuhan laut dengan dalih upaya penyelundupan. Hal tersebut sebenarnya menjadi persoalan tersendiri karena melanggar kebijakan rejim devisa bebas. 3). Dilanjutkan dengan memobilisasi kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengajak rakyat menyumbangkan kekayaan demi membantu negara. 4). Khusus untuk buruh, ada pemaksaan pada setiap buruh untuk ikut pre-Februari, 1984; Farchan Bulkin, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi," *Prisma*, No. 8, 1984.)

¹¹ Pada akhir Pebruari 1998 pemerintah berjanji akan membayar seluruh uang milik nasabah yang disimpan pada 16 bank likuidasi. Untuk nasabah yang mempunyai simpanan dalam dollar akan dibayarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada Agustus 1997 sekitar Rp. 3.000,-. Sementara di bank lain, yaitu BCA, telah terjadi kepanikan nasabah. Pada tanggal 3 Maret 1998 nasabah-nasabah BCA menarik uang mereka disebabkan ada desas-desus uang BCA akan digunakan untuk membayar cicilan nasabah 16 bank likuidasi.

BCA—bank swasta terbesar di Indonesia kurun Soeharto—menjadi bangkrut disebabkan oleh pemegang saham terbesar—anak-anak Soeharto (*crony*), yang menjadi komisaris di situ, —telah mengambil seluruh uangnya jauh-jauh hari sebelum krisis secara resmi dinyatakan oleh pemerintah. BCA kemudian diambil alih oleh pemerintah untuk disehatkan kembali. Setelah sehat dijual kembali ke swasta asing.

gram Jamsostek. Penjelasan ikut Jamsostek adalah: uang tersebut akan digunakan untuk membantu buruh-buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum mendapat pekerjaan baru di luar pabrik (rumusan ini tentu membuat bingung untuk memahami apa itu Jamsostek). 5). Sedang dari Lingkungan MPR segera setelah memilih Soeharto sebagai presiden untuk yang ke-7 kalinya, dan susunan kabinet ke-7 terbentuk, presiden mengumumkan bahwa gaji-pokoknya selama setahun disumbangkan untuk program pengentasan kemiskinan. Melalui tindakan 'pengorbanan' personal ini diharapkan seluruh menteri kabinet ke-7, para gubernur dan bupati, dan para pejabat eselon I melakukan hal serupa. Pengelolaan uang akan dilakukan oleh Menteri Sosial dalam kabinet ke-7, Siti Hadianti Indra Rukmana (Tutut).

Sementara itu kondisi buruh semakin terpuruk oleh krisis kapitalisme. Lebaran tahun 1998 dirayakan dengan PHK besar-besaran dan mencuatkan jumlah penganggur industri mencapai 14 juta jiwa.

World Bank turun tangan untuk meredam kemungkinan kerusakan menjelang SU-MPR, yaitu dengan mengedepankan program-pinjaman-padat karya bagi kaum ter-PHK: *social safety net* (jaring pegaman sosial-JPS).

Di lingkungan pengusaha dilakukan *merger* (akuisisi) antara beberapa perusahaan guna menghindari 'menghadapi kehancuran lebih parah.' Perusahaan menjadi keropos karena ternyata posisi kunci dalam berbisnis yaitu pembuatan L/C dipegang oleh kapital-finans internasional. Dan para kapital-finans ini ada dalam genggamannya negeri-negeri adikuasa G7. Upaya apa pun yang akan dilakukan harus dalam perkenan G7.

Bila kembali ke titik awal Orde Baru bahwa IMF dan World Bank menjadi tulang-punggung dari berjalannya Indonesia dengan tugas mulia [atas nama] 'pembangunan' (*development*). Kalau periode Soekarno (1945-1967) yang penuh dinamika aktivitas politik rakyat dianggap membuat tidak ada 'pembangunan.' Ternyata setelah 32 tahun rejim Soeharto resep 'pembangunan' kita sadari juga salah. Stabilitas politik bukan bagian integral dalam membangun kesejahteraan rakyat banyak. Bahkan sebetulnya sulit

untuk membuktikan Orde Baru telah mensejahterakan rakyat Indonesia.

Politik-ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada utang luar negeri. Kebijakan ‘pembangunan’ hanya dapat direalisasikan dalam kerangka utang dan investasi asing. Konstruksi ‘pembangunan’ betul-betul tergantung pada inisiatif dan kapital asing. Utang sudah sangat besar muncul angka US\$ 143 milyar,¹² gabungan dari utang pemerintah dan sektor swasta (baca: *crony*). Artinya jumlah tersebut menjadi warisan Soeharto terhadap bangsa (rakyat) Indonesia untuk membayarnya. ‘Strategi’ membayar utang sebenarnya telah dirumuskan sejak jaman Soeharto, pada 1995, yaitu: menjual BUMN.¹³

Rejim Soeharto tidak menduga akan terjadi permainan jual-beli valuta asing (valas) oleh *fund manager* George Soros yang berakibat nilai tukar rupiah melemah drastis. Akibat permainan valas bahkan pernah memerosotkan nilai rupiah mencapai nilai terendah: Rp. 16.000,-/USD. Artinya nilai rupiah terdepresiasi hingga 800 persen. Tentu saja ekonomi nasional ambruk.

Orde Baru, dianggap berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri dari posisi presiden pada 20 Mei 1998. Terjadi kebangkrutan negara.¹⁴ Kebangkrutan yang sebetulnya terjadi disebabkan krisis kapitalisme global.

¹² Berdasarkan catatan yang ada pada Menko Ekuin utang luar negeri Indonesia per 31 Maret 2000 mencapai US\$ 144,23 milyar. Dari jumlah itu utang pemerintah (tidak termasuk utang BUMN) mencapai US\$ 75,03 milyar, sedangkan utang swasta US\$ 69,2 milyar. Sementara utang BUMN tercatat US\$ 5,14 milyar. Dari seluruh utang swasta US\$ 69,2 milyar, utang non perbankan mencapai US\$ 42,5 milyar. Perinciannya PMA sebesar US\$ 27,9 milyar dan PMDN sebesar US\$ 14,6 milyar. (*Kompas*, 23 Agustus 2000.)

¹³ Lihat “Our Foreign Debts,” *Jakarta Post*, June 15, 1995.

¹⁴ Saya ulangi: “terjadi kebangkrutan negara.” Di lain sisi, individu-individu kaya yang ada di dalam negara tidak bangkrut. Mereka justru menjadi semakin kaya, karena uang mereka disimpan (diinvestasi) dalam US\$ (seringkali juga disimpan di bank internasional seperti di Negara Swiss). Kemerosotan nilai rupiah terhadap US\$ membuat kemampuan belanja individu-individu kaya ini semakin besar. Soeharto

Krisis telah menghantam Thailand (1997), Filipina, Indonesia, Malaysia. Tidak ada yang dikenal sebagai: fundamental (basis) ekonomi. Bagi Indonesia, fundamental ekonomi dalam industri manufaktur adalah: mayoritas bahan baku, sekitar 85%, didatangkan dari negeri lain. Hanya sekitar 15% komponen lokal. Kemungkinan besar yang dihitung sebesar 15% adalah tenaga kerja (buruh) dan gedung serta listrik. Jadi fundamental ekonomi Indonesia adalah: jumlah buruh yang melimpah dan telah didepolitisasi. Krisis menghantam Indonesia disebabkan 85% bahan baku internasional tidak dapat disediakan dari dalam negeri. Artinya, itu adalah krisis global pula ketimbang krisis Indonesia semata.

Krisis kapitalisme ini di Indonesia mendorong krisis politik. Ketidak-demokratisan Soeharto selama berkuasa telah menjadi bumerang bagi dirinya.

Euforia politik menyambut jaman baru: 'reformasi.' Lebih dari 250 partai politik terbentuk, lebih dari 70 serikat terbentuk. Ini adalah kondisi-kondisi menarik dalam kehidupan politik Indonesia. Banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan bila perubahan tidak sebatas beramai-ramai membentuk organisasi politik.

Penutup

Orde politik dengan cepat berganti. Ruang politik lebih terbuka. Namun itu semua tidak identik dengan perubahan kehidupan sosial-ekonomi. Mayoritas Rakyat Indonesia masih miskin. Padahal bumi Indonesia kaya; mengapa selalu mengharapkan investasi dari luar negeri (asing)?!

Negeri yang seperempat abad yang lalu pernah membanggakan diri dengan idiom *gemah ripah loh jinawi*-nya, kini terpuruk dengan memikul utang terbesar. Sementara kebangkrutan tersebut sebetulnya bukan berarti hilangnya berbagai potensi kekayaan alam. Kekayaan alam bumi Indonesia masih berlimpah. Kebangkrutan

dan keluarganya telah meraup begitu banyak uang di masa Orde Baru. Majalah *TIME* mengungkapkan hal ini dalam *Special Report* "Suharto Inc. How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune." *Time*, May 24, 1999. Hal. 16-28.

yang terjadi hanya sebatas pasar modal dan bisnis kapitalis yang menjadi 'tulang punggung' negara Indonesia.

Globalisasi imperialisme harus ditentang. Globalisasi imperialisme telah menghancurkan perekonomian nasional; telah memiskinkan mayoritas penduduk negeri: melalui penghapusan subsidi atas berbagai kebutuhan dasar rakyat.¹⁵ Dan itu bermakna *membekukan kehidupan*, karena dalam banyak hal *globalisasi telah memasung potensi ekonomi-sosial-politik-budaya bangsa agar tidak maju dan berkembang*.

Adalah suatu kerja besar untuk membangun negeri demokratis yang bebas dari penghisapan imperialisme sekaligus terlepas dari

¹⁵ Sejak perdagangan bebas masuk di Indonesia, setelah tahun 1998, jumlah penganggur /setengah penganggur telah mencapai 40 juta orang.

Bila kita tengok negeri lain yang dililit utang seperti Zambia (Afrika), sejak sepuluh tahun yang lalu dipaksa mengikuti resep IMF dengan mencabut berbagai subsidi, hasilnya: angka harapan hidup jatuh dari 54,4 tahun di tahun 1991 menjadi 42,6 tahun di tahun 1997. Angka melek huruf berkurang, dan sebagai akibat langsung dari naiknya biaya rumah sakit sekarang tercatat 203 kematian bayi per 1.000 kelahiran dibandingkan 125 di tahun 1991. Akses mendapatkan air bersih berkurang, dan 98,1 persen jumlah penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari 20 ribu rupiah per hari.

Di Belgia (negeri makmur) ketika perusahaan penerbangan negara dijual pada perusahaan asing, yang terjadi adalah berbagai macam rute dihapuskan karena bentrok dengan rute asli dari perusahaan asing (dari Perancis). Hasilnya: beberapa bulan yang lalu perusahaan penerbangan Belgia tersebut bangkrut dan seluruh pekerjanya di-PHK.

Di Amerika Serikat, masyarakat mulai mengadakan protes menentang pencabutan subsidi. Beberapa bulan lalu, pemogokan nasional para supir truk telah melumpuhkan jalur transportasi di negeri itu. Bukannya pernyataan "investor (pinjaman luar negeri) = kemakmuran" tidak lebih merupakan bualan belaka? Yang makmur hanya si pengusaha.

Di Indonesia, data BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan: sejak tahun 1996 harga-harga telah naik sebesar 226,04% (lebih dari tiga kali lipat); sementara upah secara nasional hanya naik sekitar 50% (satu setengah kali lipat). Ini sebelum ada kenaikan harga BBM yang begitu tinggi (rencananya akan dinaikkan terus sampai 100% atau 2 kali lipat dari tingkat harga BBM di tahun 1999). (dikutip dari Rina Oktaviani dan Bustanul Arifin, "...")

penindasan para elit penguasa negara—yang menjadi *kaum kapitalis-perampok*. Tapi dalam konteks biang keladi dari penindasan dan penghisapan ini adalah kaum imperialis maka saatnya kita bersatu menentang globalisasi imperialisme di Indonesia, demi penyelamatan harkat dan martabat berbangsa yang merdeka!

Referensi

- (1) Alavi, Hamza. “State and Class Under Peripheral Capitalism,” dalam Hamzah Alavi & Teodor Shanin (eds.), 1982, *Introduction to The Sociology of Developing Societies*, Macmillan Press Ltd.
- (2) Bulkin, Farchan. “Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian,” *Prisma*, no. 2, Februari, 1984.
- (3) _____. “Negara, Masyarakat dan Ekonomi,” *Prisma*, No. 8, 1984.
- (4) Grinspun, Ricardo & Cameron, Maxwell A. (eds.). *The Political Economy of North American Free Trade*, Canadian Centre for Policy Alternative, Ottawa, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston - London, 1993.
- (5) Grossmann, Henryk, *Hukum Akumulasi dan Keruntuhan Sistem Kapitalisme*, Hasta Mitra, 2003.
- (6) Harman, Chris, “Anti-capitalism: Theory and Practice,” *International Socialism* No 88, London, 2000.
- (7) Khor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002.
- (8) *Panduan Masyarakat Untuk Memahami World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)*, Working Group on the WTO/MAI (1999) (diterjemahkan oleh INFID - 1999).
- (9) Raghavan, Chakravarthi, *Recolonization: GATT, the Uruguay Round & the Third World*, Third World Network, Malaysia, 1990.
- (10) Setiawan, Bonnie. *Stop WTO Dari Seattle Sampai Bangkok*, INFID. 2000.
- (11) IUF/UITA/IUL. *The WTO and the World Food System: a trade union approach*. Geneva 2002.

Yayasan Penebar adalah institusi nir-laba independen. Kami berharap saudara/i (individu) maupun organisasi bersedia mendukung aktivitas kami. Kami menerima donasi, hibah dan dukungan tak mengikat dalam bentuk apapun. Bila saudara/i bermaksud mendukung kami dengan mendonasikan uang, rekening bank kami adalah: BCA (Cabang Cimanggis), rekening Tahapan BCA, nomor account: 166 1746276.